

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI AKRUAL: STUDI
KASUS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL**

Yeni Priatna Sari¹, Hetika², Nurul Mahmudah³

Email: yeni.priatna@gmail.com¹, hetika_tika@yahoo.co.id²; nurulmahmudah1989@gmail.com³

Politeknik Harapan Bersama Tegal

Jalan Mataram No. 9 Kota Tegal 52142, Indonesia Telp. (0283) 352000

Abstract: *This study aims to explore the extent to which the development of the application of The Government Regulation No. 71/2010 which has been applied in the process of accounting at BLUD Kardinah Hospital Tegal City. Associated with the change of government accounting system from cash base to accrual base as stipulated by Government Regulation No. 71 Year 2010.*

This research methodology used is descriptive method with interpretive method and using primary data obtained by interview to head of Accounting Department of Kardinah General Hospital as well as stakeholders at Kardinah General Hospital. The results of this study show that Kardinah hospitals are ready and already implemented Accounting Standard based on accruals. Judging from some parameters such as the application of PP 71 Year 2010, the readiness of human resources, organizational commitment, communication, quality of accounting information system, financial reporting quality, infrastructure and consultant support on accrual basis implementation. It is hoped that despite being ready to implement SAP accrual basis, the management of Kardinah General Hospital as well as Tegal City Government can always improve the regulations at the technical level in responding to the regulatory changes regarding the application of accrual basis in accounting.

Keywords: *evaluation of accrual accounting system, government accounting standard, PP 71/2010, BLUD Kardinah hospitals.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana perkembangan penerapan PP No 71/2010 yang telah diterapkan dalam proses akuntansi pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal. Dikaitkan dengan adanya perubahan sistem akuntansi pemerintahan dari cash basis menuju accrual basis yang ditetapkan dengan PP No 71 Tahun 2010.*

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan metode interpretatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada kepala Bagian Akuntansi RSUD Kardinah serta pemangku kepentingan pada RSUD Kardinah.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa RSUD Kardinah telah siap dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Dilihat dari beberapa parameter seperti tingkat penerapan PP 71 Tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen organisasi, komunikasi, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, kesiapan sarana prasarana

dan dukungan konsultan terhadap pelaksanaan basis akrual. Diharapkan meskipun telah siap melaksanakan SAP basis akrual, pihak manajemen RSUD Kardinah dan juga Pemerintah Kota Tegal dapat selalu memperbaiki peraturan-peraturan di tingkat teknis dalam mensikapi perubahan-perubahan peraturan mengenai penerapan akrual basis.

Kata kunci : *evaluasi sistem akuntansi akrual, standar akuntansi pemerintah, PP 71/2010, BLUD RSUD Kardinah.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah memberikan kewenangan daerah dalam bentuk otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik yang saat ini telah terdesentralisasi ke masing-masing daerah. Pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang baik.

Standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah merupakan standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Adanya ketentuan pemerintah yang baru yaitu PP No 71 tahun 2010 adalah sebuah tonggak awal untuk melakukan perubahan pada pengelolaan keuangan daerah dari cash basis menuju accrual basis. Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara meliputi 1) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 3) Undang-undang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan

Tanggung jawab keuangan Negara. Dimana dari ketiga Undang-undang tersebut mengandung tiga prinsip manajemen keuangan negara yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi (Waluyo, 2011).

Pada lingkup pemerintahan, terdapat beberapa satuan kerja yang berpotensi untuk dapat dikelola secara profesional melalui pola Badan Layanan Umum. Pada pola Badan Layanan Umum masyarakat akan memberikan imbalan kepada BLU dalam proporsi yang signifikan terkait pelayanan yang diberikan oleh BLU. Akan tetapi ada sebagian pula yang bergantung pada besarnya dana APBN/APBD. Dari pola BLU tersebut satuan kerja dapat memperoleh pendapatan selain dari dana APBN/APBD yang dikelola sehingga satuan kerja dapat mempunyai keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kesempatan ini diberikan oleh pemerintah khusus kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik, seperti rumah sakit, perusahaan air minum dsb.

Dari latar belakang diatas, dengan diadakannya sistem akuntansi pemerintah yang baru yaitu PP No 71 tahun 2010 dan berdampak pada SKPD yang berorientasi pada pelayanan publik berikut perubahannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana implementasi dari PP No 71

tahun 2019 pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Sejauh manakah implementasi / pelaksanaan sistem akuntansi akrual yang telah dilaksanakan pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal ?
2. Hal-hal apa sajakah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem Akuntansi akrual pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal?
3. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang menjadi kendala / permasalahan dalam pelaksanaan sistem akuntansi akrual Pemerintah Tegal
3. Untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal.

Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan segi teori, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam permasalahan implementasi sistem akuntansi akrual pada dunia pemerintahan.
2. Berdasarkan segi praktik, sebagai sumbangan bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal serta RSUD Kardinah dan Pemerintah Daerah Kota Tegal

untuk dapat mengaplikasikan peraturan pemerintah terbaru sebagai bentuk pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada sektor publik.

Pembatasan Masalah

Untuk mempertajam permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi permasalahan pada evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada BLUD RSUD Kardinah terutama pada mekanisme pelaksanaan dan penyajian pelaporan keuangan untuk tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer akan diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi pada BLUD RSUD Kardinah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada RSUD Kardinah. Data sekunder diperoleh dari sumber informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah pada RSUD Kardinah Kota Tegal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2010) wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Bagian Akuntansi pada RSUD Kardinah serta beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan pada RSUD Kardinah.

2) Observasi

Menurut Indriantoro dan Suppomo (2002), observasi yaitu data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Observasi dalam penelitian ini akan langsung menuju RSUD Kardinah sebagai obyek penelitian.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010) dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini akan berupa catatan dan rekaman wawancara dan dokumentasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi dan Pemangku kepentingan di RSUD Kardinah.

4) Studi Pustaka

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) studi pustaka yaitu bahan utama dalam penelitian data sekunder. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal/literatur, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan implementasi PP 71 No 2010 pada lembaga pemerintah.

Model Penelitian

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif yaitu suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan

merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya (Lamonisi, 2016). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum RSUD Kardinah

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal didirikan oleh adik kandung R.A. Kartini yaitu R.A. Kardinah Reksonegoro X pada tahun 1927 dengan biaya pertama f.16.000 dari hasil penjualan buku karya tulisnya, karena keinginan yang besar untuk menolong rakyat miskin khususnya kaum wanita yang waktu itu belum mendapat pelayanan kesehatan secara layak. RSUD Kardinah mempunyai visi Menjadi rumah sakit bertaraf nasional, mandiri dengan pelayanan prima dan untuk mewujudkan visi tersebut RSUD Kardinah mempunyai misi sebagai berikut yaitu mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif dan profesional (*Good Corporate Governance*), memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa rumah sakit dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi serta berkeadilan (*Good Clinical Governance*) dan mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran terkini berwawasan lingkungan (*Continuous Improvement*). RSUD Kardinah juga memiliki motto KesembuhandanKepuasanAndaadalahKeutamaanBagi Kami serta falsafah dalam bekerja yaitu PelayananKesehatan yang

Diselenggarakan Atas Dasar Keikhlasan, Kesungguhan, Beretika dan Amanah Menjadikan Setiap Langkah Pelayanan Jadi Ibadah. Dan berikut ini adalah nilai-nilai yang dibangun oleh manajemen RSUD Kardinah dalam bekerja : 1) Kerjasama Team; 2) Integritas; 3) Kemanusiaan; dan 4) Profesional. Nilai-nilai tersebut yang membentuk SDM RSUD Kardinah sehingga pada tahun 2015 RSUD Kardinah dapat meraih akreditasi B dalam penilaian akreditasi versi tahun 2012.

Berikut ini adalah jenis pelayanan unggulan yang diberikan oleh RSUD Kardinah selama ini :

Tabel 1 Jenis Pelayanan Unggulan RSUD Kardinah

NO	JENIS PELAYANAN
1	Rs Rujukan Regional
2	Traumatologi
3	Unit Stroke
4	Rs Rujukan Program 'Emas'
5	Klinik Vct - Pmtct
6	Eswl
7	Mri
8	Klinik Konseling Diabetisi
9	Klinik Disfungsi Ereksi
10	Klinik Kosmetik Medik
11	Klinik Stroke - Epilepsi-Nyeri
12	Klinik Rehabilitasi Napza

Sumber : Profil RSUD Kardinah 2015

Pelayanan unggulan RSUD Kardinah tersebut diantaranya menjadi sumber pendapatan pada RSUD Kardinah. Diantaranya adalah adanya pasien yang menjalani rawat jalan dan rawat inap yang diterima melalui klinik-klinik dalam RSUD Kardinah.

Berikut ini adalah jenis pelayanan spesialisasi berikut dengan jumlah tenaga kesehatannya:

Tabel 2 Jumlah Pelayanan Spesialisasi di RSUD Kardinah

NO	JENIS PELAYANAN SPESIALISASI	JUMLAH TENAGA
1	Penyakit Dalam	3
2	Bedah	3
3	Bedah Syaraf	1
4	Bedah Tulang	1
5	Bedah Mulut	1
6	Urologi	1
7	Obstetri	4
8	Kesehatan Anak	2
9	Mata	2
10	THT	2
11	Kulit Kelamin	2
12	Paru-Paru	3
13	Jantung	2
14	Anestesi	3
15	Radiologi	1
16	Neurologi	4
17	Rehabilitasi Medik	1
18	Psikiater (Dokter Ahli Jiwa)	1
19	Konservasi Gigi	1
20	Patologi Klinik	2
21	Mikrobiologi	1

Sumber : Profil RSUD Kardinah 2015

Keseluruhan unit pelayanan spesialisasi RSUD Kardinah yang telah ditampilkan diatas adalah potensi pendapatan yang menjadi unggulan dari RSUD Kardinah.

Tabel 3 Profil Responden

N O	NAMA	JABATAN	USIA	PENDIDIKAN
1	Cahyo Supriadi	Kabag Keuangan Plt Wakil Direktur Umum dan Keuangan	45 tahun	S2 Magister Manajemen – Universitas Dian Nuswantoro Semarang
2	Sarjito	Kasubag Akuntansi	51 tahun	S1 STIE Cendikia Karya Utama Semarang
3	Paryanto	Kasubbag Pendapatan dan Belanja	53 tahun	S2 Magister Manajemen Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Sumber : data primer yang diolah (2016)

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntansi akrual basis dengan melihat beberapa hal berikut : parameter penerapan PP No 71 tahun 2010, parameter kesiapan SDM terhadap pelaksanaan SAP Basis akrual, parameter komitmen organisasi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter komunikasi terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual, parameter kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter kualitas pelaporan keuangan terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter kesiapan sarana prasarana terhadap pelaksanaan SAP dan terakhir adalah parameter dukungan konsultan terhadap pelaksanaan SAP basis akrual.

Berikut ini adalah hasil tabulasi dari ke delapan parameter yang telah dikonfirmasi kepada para responden.

Tabel 4 Tabulasi Hasil Wawancara Responden

N O	PARAMETER	S T S	CS	S	SS
1	Penerapan PP 71 tahun 2010			30 atau 100 %	
2	Kesiapan		3	30	

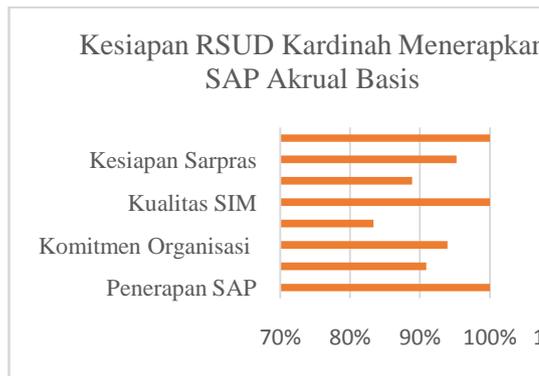
	SDM terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual	atau 9%	atau 91%	
3	Komitmen Organisasi terhadap pelaksanaan SAP Basis akrual	1 atau 3%	31 atau 94%	1 atau 3%
4	Komunikasi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual		5 atau 83%	1 atau 17%
5	Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual		12 atau 100 %	
6	Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual	2 atau 11%	16 atau 89%	
7	Kesiapan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan SAP		20 atau 95%	1 atau 5%
8	Dukungan konsultan terhadap pelaksanaan SAP basis akrual		9 atau 100 %	
	Jumlah Keseluruhan	6	123	3

Sumber : data primer yang diolah (2016)

Dari hasil tabulasi diatas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) responden yang menyatakan kesiapan terhadap penerapan sistem akrual basis dalam bidang pemahaman terhadap SAP No 71 tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen

organisasi, komunikasi, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, sarana prasarana dan dukungan konsultan telah ditunjukkan dengan sebanyak 123 butir pernyataan.

Grafik 4. 1 Kesiapan RSUD Kardinah Menerapkan SAP Akrua Basis



Sumber : data primer yang diolah (2016)

Dari grafik diatas terlihat bahwa di hampir semua indikator RSUD Kardinah telah menyatakan kesiapan nya dengan ditunjukkan oleh 75% responden menyatakan siap dalam melakukan implementasi sistem akuntansi akrual yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.

Pembahasan

Evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi akrual tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Akan tetapi dari berbagai sisi yang dapat menunjang pelaksanaan sistem akuntansi akrual dalam sebuah entitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas 8 (delapan) indikator yang diperkirakan menunjang pelaksanaan sistem akuntansi.

Berikut ini adalah analisa per masing-masing indikator sebagai parameter penerapan sistem akuntansi akrual pada RSUD Kardinah.

Pemahaman PP No 71 Tahun 2010

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semua pimpinan bagian keuangan di RSUD Kardinah menyatakan telah paham akan penerapan PP 71 tahun 2010. Pemahaman tentang penerapan PP 71 Tahun 2010 yang telah dikonfirmasi oleh peneliti tentang penggunaan SAP 2010 berbasis akrual telah digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan BLUD RSUD Kardinah. Di dalam pelaporan keuangan BLUD RSUD Kardinah juga terdapat informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran nya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kardinah

PENDAPATAN RSUD KARDINAH TAHUN 2011 – 2015			
TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2011	67.136.975.000	66.690.249.289	99,33
2012	79.833.487.000	84.018.799.505	105,24
2013	86.611.450.000	91.483.663.296	105,63
2014	130.510.100.000	133.860.833.129	102,57
2015	150.183.500.000	154.026.085.063	102,56

Sumber : Profil RSUD Kardinah Tahun 2015

Para pimpinan BLUD RSUD Kardinah juga dapat menjelaskan tentang informasi mengenai potensi RSUD Kardinah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan RSUD Kardinah.

Tabel 6 Sumber pendapatan RSUD Kardinah

N O	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	RawatJalan	16.500.500.000	15.284.213.226	92,63
2	RawatInap	73.870.000.000	73.430.785.739	99,41

3	Obat-obatan	49.808.450.000	52.631.526.401	105,67
4	Laboratorium	7.060.250.000	8.811.214.562	124,80
5	Radiologi	1.850.000.000	2.855.154.509	154,33
6	Ambulance	125.000.000	128.340.000	102,67
7	PelayananPenunjang	305.350.000	312.308.000	102,28
8	JasaGiro	562.000.000	464.542.626	82,66
9	Lain2PendptanBLUD ygsah	102.000.000	108.000.000	105,88
J U M L A H		150.183.500.000	154.026.085.063	102,56

Sumber : Profil RSUD Kardinah Tahun 2015

Sumber pemasukan lain dari BLUD RSUD Kardinah selain dari pendapatan operasional adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung di BLUD. Hal tersebut cukup membantu RSUD Kardinah sebagai sarana pengembangan RSUD.

Parameter Kesiapan SDM Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Kesiapan SDM BLUD RSUD Kardinah terhadap pelaksanaan SAP berbasis akrua juga dilihat dalam penelitian ini. Hal tersebut terlihat dari ketiga pimpinan BLUD RSUD Kardinah yang menyatakan bahwa manajemen RSUD Kardinah telah memiliki SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan dalam penyediaan dan penyusunan laporan keuangan.

Tabel 7Jenis Pelatihan Yang Pernah Diikuti SDM BLUD RSUD Kardinah

NO	PELATIHAN	TAHUN
1	Pelatihan pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah	2015
2	Pelatihan Standar	2015

**Akuntansi
Pemerintah Berbasis
Akrua**

Sumber : data primer yang diolah (2016)

Selain itu sebagai wujud dari persiapan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah, Manajemen RSUD Kardinah juga telah menerapkan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktek KKN dan SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Hanya manajemen RSUD Kardinah belum menerapkan sistem reward dan punishment dalam menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja yang optimal di bidang keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan kondisi SDM tersebut, BLUD RSUD Kardinah pada tahun 2012 telah meraih akreditasi Rumah Sakit dengan peringkat B.

Parameter Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Komitmen organisasi yaitu pihak manajemen RSUD Kardinah juga dilihat dalam penelitian ini sebagai faktor penting dalam melihat kesiapan manajemen dalam pelaksanaan SAP Basis Akrua. Kesiapan organisasi tersebut dapat dilihat dari para pimpinan terutama di bagian keuangan RSUD Kardinah yang memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik serta menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrua. Selain itu para pimpinan di bagian keuangan RSUD Kardinah juga telah memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan.

Menurut Kasubag Akuntansi di RSUD Kardinah, komitmen organisasi dalam RSUD Kardinah ditunjukkan dengan adanya manajemen untuk memantau kehadiran karyawan yaitu finger print bagi seluruh karyawan, adanya job description bagi semua posisi jabatan, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dari bagian hukum kota Tegal diantaranya adalah jam kerja mulai dari jam 7 hingga jam 14.00 di setiap harinya.

Selain komitmen tersebut, menurut Kepala Bagian Keuangan Plt Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyampaikan bahwa RSUD Kardinah juga komitmen terhadap penentuan tarif, pelayanan *hospital by law*, penatausahaan keuangan dan pengelolaan karyawan. Dimana hal tersebut telah ada ketentuan dalam peraturan Pemerintah. Demikian pula pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap kegiatan pelayanan. Rapat-rapat pimpinan setiap bulan, adanya komite medik untuk memantau pelayanan terhadap pasien, dan rapat struktural juga struktural plus bagian-bagian tertentu dalam RSUD Kardinah.

Parameter Komunikasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Parameter komunikasi terhadap pelaksanaan SAP Basis akrua juga dilihat dalam penelitian ini yaitu apakah manajemen RSUD Kardinah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi yang efektif dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrua.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan di bagian akuntansi dan keuangan RSUD Kardinah dapat dilihat bahwa RSUD Kardinah telah melakukan

komunikasi yang efektif berupa membuat buku Kumpulan Standar Operasional Prosedur, Job Description, Prosedur dan Ketetapan, Peraturan Walikota. Selain itu RSUD Kardinah juga telah mengadakan sistem komunikasi dengan menggunakan Aiphone, Pengeras suara, Blue Code, Red Code, Pink Code, Black Code dan Sistem Informasi Management RS.

Parameter Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi juga dilihat dalam penelitian ini. Selama ini Sistem Informasi Akuntansi yang ada di RSUD Kardinah menggunakan Sistem Informasi yang telah di tentukan oleh BPKP dengan nama Sistem Informasi BLUD untuk mencatat transaksi pembukuan BLUD. Dan satu sistem informasi yang berasal dari Pemda Kota Tegal yaitu SIMDA (Sistem Informasi Daerah).

Selain kesiapan Sistem Informasi Akuntansi, manajemen RSUD Kardinah juga telah bekerjasama dengan BPKP dan juga konsultan dari BPKP untuk mengkondisikan agar pencatatan akuntansi yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, akurat dan presisi mulai dari pencatatan transaksi hingga laporan keuangan.

Parameter Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Kesiapan pelaporan keuangan RSUD Kardinah terhadap pelaksanaan SAP basis akrua dilihat dari apakah manajemen RSUD Kardinah terutama pada bagian akuntansi dan keuangan telah memahami apa itu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua, dan telah mempersiapkan pelaporan keuangan tahun

terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71/2010. Selain itu laporan keuangan tahun 2015 RSUD Kardinah juga telah di audit oleh BPK dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik baru dilakukan pada bulan Desember 2016 sehingga belum dapat diketahui hasilnya. Sedangkan untuk kelengkapan Peraturan Walikota tentang standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan berdasarkan SAP No 71/2010 masih belum terlalu lengkap sehingga menurut Kasubag Akuntansi RSUD Kardinah masih perlu penambahan untuk pedoman Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Tegal.

Parameter Kesiapan Sarana Prasarana Terhadap Pelaksanaan SAP

Kesiapan sarana prasarana yang telah pada RSUD Kardinah terhadap pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat dilihat dari kemauan dan integritas manajemen RSUD Kardinah dalam mempersiapkan sarana ruangan yang memadai untuk operasional perangkat SAP, adanya dukungan sarana administrasi yang memadai, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia dan adanya pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP. Semua telah dilakukan oleh manajemen RSUD Kardinah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual.

Parameter Dukungan Konsultan Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrual

Kesiapan konsultan terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual dapat dilihat dari adanya dukungan konsultan

dalam peningkatan kompetensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas untuk mempersiapkan, menyusun laporan keuangan. Konsultan pelaksanaan SAP basis akrual saat ini telah dilaksanakan oleh BPKP yang telah mendampingi bagian keuangan dan akuntansi RSUD Kardinah dalam melaksanakan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pihak manajemen BLUD RSUD Kardinah telah siap dan telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah terbaru yang dituangkan dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Saran

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu butuh dukungan penuh dari manajemen RSUD Kardinah dalam melakukan implementasi standar akuntansi keuangan pemerintah yang baru. Standar akuntansi yang baru membutuhkan banyak pembelajaran serta sumber daya manusia yang handal dalam melakukan justifikasi atas setiap transaksi yang ada dalam rumah sakit. Oleh karena itu saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan adanya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan atau workshop tentang perubahan peraturan ataupun sosialisasi terbaru di bidang kebijakan akuntansi pemerintahan. Karena sering terjadi perubahan aplikasi pada SIMDA, adanya ketentuan atau peraturan baru, ataupun kode rekening baru.
2. Dibutuhkan adanya Peraturan Walikota tentang transaksi-

transaksi yang berkaitan dengan penghapusan piutang macet ataupun transaksi-transaksi yang luar biasa namun material yang terjadi dalam pelaporan keuangan BLUD.

3. Diharapkan adanya kesamaan kode rekening antara Kementerian Dalam Negeri dengan kode rekening dari Kementerian Kesehatan yang dampaknya jika tidak ada kesamaan akan membuat kerancuan dalam pembuatan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lamonisi, S., 2016. The Analysis Implementation of Accounting Standards Accrual Based in The City Government Tomohon. *EMBA*, 4(1), pp. 223-230.
- [2] Permendagri, 61/2007. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- [3] Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Waluyo, I., 2011. Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Volume IX. No. 2, pp. 1 - 15.